

BAB V

KESIMPULAN

Pers pada mulanya hanya digunakan dalam pengertian media yang berbentuk cetak saja, disesuaikan dengan arti dari kata *press* yaitu menekan atau mengepres. Pers berkaitan dengan aktivitas menertibkan sesuatu dengan cara dicetak. Perkembangan pers Indonesia tidak terlepas dari kondisi politik Indonesia, pers di Indonesia mulai berkembang jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan.

Pers atau surat kabar pada masa kepemimpinan Soekarno harus mentaati peraturan penguasa perang tertinggi (Panglima) dan loyal terhadap manipolusdek. Baru ketika memasuki masa Orde Baru pers dapat bergerak. Begitu juga dengan Surat Kabar Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat berkembang pesat di Jawa Barat. Namun karena belum memiliki Surat Ijin Terbit maka Pikiran Rakyat sempat vakum atau berhenti dan baru pada tanggal 24 Maret 1966 Pikiran Rakyat muncul kembali. Sejarah mencatat pers pertama di Indonesia yaitu *Medan Prijaji*, Bandung oleh Tirta Adhi Soerjo.

Perjalan Pikiran Rakyat pada awal berdiri 30 Mei 1950-1965 berbeda visi dengan Pikiran Rakyat pada 24 Maret 1966 sampai tahun 1974. Pada tahun 1950-1965 disebut fase I pada masa kepemimpinan Asmara Hadi dan Ratna Juwaimi puteri Soekarno yang membuat Pikiran Rakyat pada masa itu beraliran nasionalis. Pikiran

Rakyat mulai 24 Maret 1966 disebut sebagai fase II. Pada fase ini Pikiran Rakyat dipimpin oleh Sakti Alamsyah Siregar (1966-1983) dan berhasil mendapat dukungan dari pemerintah dan militer.

Meskipun Pikiran Rakyat sempat berhenti terbit karena terlambat berafiliasi dengan kekuatan politik, namun Pikiran Rakyat dapat bangkit kembali dan pada tanggal 9 April 1973 resmi menjadi PT. Pikiran Rakyat Bandung. Pada masa Orde Baru, perjalanan Pikiran Rakyat tidaklah mudah, ada beberapa kendala yang dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pikiran Rakyat yaitu terjadi krisis kertas pada tahun 1945-1950, dalam menghadapi hal tersebut Pikiran Rakyat mengganti kualitas kertas menjadi kertas merang dan pastur. Keterbatasan kertas pada tahun 1945-1949 Pikiran Rakyat hanya terbit 1 sampai 2 halaman saja. Namun, pada masa itu Pikiran Rakyat tidak hanya terbit di Bandung tetapi juga sampai merambah keseleruh pelosok Jawa Barat dan menetapkan diri sebagai surat kabar orang Jawa Barat, sekaligus terbesar di Jawa Barat.

Pers sangat berpengaruh pada situasi politik di Indonesia (1970-1975). Salah satu fungsi pers sebagai kontrol sosial dapat membongkar kasus korupsi Pertamina termasuk Pikiran Rakyat. Pada tahun 1970-an Pangdam Siliwangi memerintahkan agar pers tidak mempublikasikan tentang masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah membatasi kebebasan pers, akan tetapi keberadaan pers tetap dibutuhkan, di antaranya yaitu untuk penggalangan massa. Namun tetap ada beberapa syarat yang harus dipatuhi media yaitu: 1. Tidak boleh menyinggung keluarga

Soeharto, 2. Tidak boleh menyinggung dwi fungsi ABRI, 3. Tidak boleh menulis hal-hal berkaitan dengan SARA.

Pasca situasi politik 1974 di Jawa Barat, Pikiran Rakyat mulai menata diri kembali. Pada tahun 1974 Pikiran Rakyat mencatat peristiwa penting yaitu mulai melengkapi diri dengan mesin percetakan offset yang dibeli dari fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan bantuan BRI, dengan mesin tersebut Pikiran Rakyat mampu mencetak 25.000 exemplar/jam. Pikiran Rakyat semakin berkembang yang ditandai dengan berdirinya PT. Granesia dan sempat beredar sampai Kuala Lumpur, Malaysia.

Kebebasan pers dan posisinya sebagai control sosial tidak bisa dikesampingkan. Pers merupakan cara atau bentuk penyaluran pernyataan kesadaran isi pikiran manusia melalui media yang keberadaannya disebabkan kemajuan kebudayaan sosial. Setiap Undang-Undang Dasar Negara dicantumkan kemerdekaan pers, namun dalam pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan sistem politik negara tersebut. Melihat perkembangannya, pers pada umumnya berusaha terus hidup ditengah pasang surut perkembangan masyarakat luas.

Demikianlah kehidupan pers termasuk Pikiran Rakyat yang hidup matinya banyak tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah. Selama ia mendukung pemerintah maka ia akan berumur panjang namun apabila ia selalu mengkritik pemerintah maka ia tidak akan dapat bertahan lama atau dengan kata lain mati.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1960

Surat Kabar Pikiran Rakyat Juni 1960.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Juli 1961.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1962

Surat Kabar Pikiran Rakyat Oktober 1962.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1963.

Surat Kabar Pikiran Rakyat November 1963.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1964.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1965.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Desember 1966.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Agustus 1968.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Desember 1969.

Surat Kabar Pikiran Rakyat November 1972.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Oktober 1973.

Surat Keputusan staff Angkatan Darat tentang Peraturan Peringatan terhadap pers tahun 1956

Surat Keputusan Penguasa Perang Tertinggi tentang izin penelitian dan penerbitan surat kabar 1960.

Peraturan Pernyataan wajib persetujuan 19 pasal bagi Pers, Sembilan Belas Pasal yang harus disetujui oleh penerbit surat kabar di tahun 1960.

Buku:

Abdul Razak, *"Antara Kebebasan Pers dalam isi tajuk rencana"*, dalam buku *Don Michael Flournoy*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989.

Abdurracman Surjomiharjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2002.

Akhmad Zaini, *Kisah Pers Indonesia 1966 – 1974*, Yogyakarta: LKIS 1995.

Antonio Gramsci, dalam Alex Sobur, *Analisis Teks dan Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Antik, "Seabad Pers Kebangsaan", [http://www.Pencintabuku.com/Journal item/67](http://www.Pencintabuku.com/Journal/item/67), diakses pada 14 Maret 2016, pukul 14.05 WIB).

A.M Hanafi, *Menggugat Kudeta Jend. Soeharto dari Gestapu ke Supersemar*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Bedjo Riyanto, *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 1870-1915*, Yogyakarta: Tarawang, 2000.

Burhan D. Magenda, *Hubungan dengan sistem politik, suatu tinjauan*, Jakarta : LP3ES, 1982.

Daliman, *Panduan Penelitian Historis*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, 2005

Deliar Noor, *Pengantar ke Pemikiran Politik II*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Depdikbud, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud, 1990.

Djamal Ali, *Sekilas Perjalanan Hidup Saya, Sebagaimana Dituturkan kepada Cendrawati Suhartono dan Pradjoto*, Jakarta: SPS Pusat, 1995.

- Djoko Soekiman, "Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya Abad XVIII sampai Medio Abad XX)", *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996.
- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Edward C. Smith, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Eriyanto, *Analisis Wacana. Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Eyo Kahya, *Perbandingan Sistem Dan Kemerdekaan Pers*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- F. Rachmadi, *Perkembangan sistem pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Fred. S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schrama, Empat Teori Pers, terj. *Putu Laxman Sanjaya Pandit*, Jakarta : PT. Internasional, 1986.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1996.
- I. Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: PT. Triyinc, 1997.
- J.S. Badudu, *Cakrawala Bahasa Indonesia I*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- _____, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 1995.
- Kuntowijoyo, *Metodelogi Sejarah, edisi 2*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- _____, *Penjelasan Sejarah: Historical Explanation*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, terjemahan Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1985.

Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Mochtar Lubis, *Pers dan Wartawan*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1962

_____, *Komunikasi dan Modernisasi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1973.

M. Gani, *Surat Kabar Indonesia Pada Tiga Zaman*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1978.

Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, Jakarta: Mega Book Store, 1986.

Oey Hong Lee, *Publistik Pers*, Jakarta: Ichtiar.

Onong U. Effendi, *Dimensi-dimensi Komunikasi*, Bandung: penerbit Alumni, 1981.

Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985.

Saefur Rohmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

_____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992

Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

_____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Smith, Edwar C. 1, *Sejarah Pembredeilan Pers Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Grafitti, 1986.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1992.

Staf Ensiklopedia Nasional Indonesia, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sumanang, *Beberapa Soal Tentang Pers dan Jurnalistik*, Jakarta: Balai Pustaka, 1952.

Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.

Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta FIS UNY : Prodi Ilmu Sejarah, 2013.

Togi Simanjuntak, *Wartawan Terpasung – Intervensi Negara di Tubuh PWI*, Jakarta : Institute Studi Arus Informasi, 1995.

Tribuana Said, *Sejarah Perkembangan Perts Nasional dan Perkembangan Pers Pancasila*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1988.

Widya Fitrianiingsi, *Perempuan Dalam Iklan Media Cetak Di Jawa Pada Masa Kolonial 1900-1942*, Yogyakarta: Skripsi, FIB UGM, 2008.

Y.B. Margantoro (ed), *Laporan Wartawan Bias dan II Cerpen Pilihan*, Yogyakarta: Tabloid Bias, Oktober, 2000.

Zulfikar Ghazali, *Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.

Skripsi & Jurnal:

Nunung Susanti, “*Perkembangan Pers Mahasiswa: Terhadap Surat Kabar Glora Mahasiswa 1974-1998*”, Skripsi, Yogyakarta: jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2001.

Toha Putratama, “*Perkembangan Periklanan di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Pada Masa Orde Baru 1966-1998*” Skripsi, Yogyakarta: jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM tahun 2007.

Widya Fitrianiingsi, *Perempuan Dalam Iklan Media Cetak Di Jawa Pada Masa Kolonial 1900-1942*”, Yogyakarta: Skripsi, jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM tahun 2008.

Antik, "Seabad Pers Kebangsaan", [http://www.Pencintabuku_multiplay.com/Journal item/67](http://www.Pencintabuku_multiplay.com/Journal_item/67), diakses pada 14 Maret 2016, pukul 14.05 WIB).

Jurnal *Mimbar Pendidikan*, No. 4 Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 1999.

Lampiran 1

Surat Kabar Pikiran Rakjat

EDISI I

Puspa Wanita

Tahun ke-IV

Harga: 250

Langsung dari

Penjualan

Penjualan

Penjualan

Pikiran Rakjat

MENGADJAK PEMBATJA BERPIKIR KRITIS

TAHUN KE-X NO. 189

SELASA 12 Januari 1960

Ministri dan pejabat

BADAN DI BAWAH TANAH

Minister

Minister

Minister

Akan Di-Indoktrinasi-kan

„Irama Togaso“ Sumbang Tjibugel

SENI yang kemarin diibay oleh Pranger telah diibay oleh...

Dim. Berdasteran Perusahaan Nasional

WNI Turunan Tionghoa

Harus Lihatkan Salinan „B.K.“

Baperki Bdg Njatakan Keberatan

BANDUNG, 12 (ANT-PR)

PARA pengurus peradilan nasional dari asil keri...
...minal Tionghoa, dalam pendaftaran perusahaan...
...nasional, harus menyerahkan lampiran yang berupa sa...
...liran „Bukti Kewarganegaraan“ mereka dari Pengadilan...

Hal di tulis diibay oleh Njatakan Keberatan...
...B.K. (Buku Kewarganegaraan) yang harus diserahkan...
...ke Pengadilan Nasional, dalam pendaftaran perusahaan...
...nasional, harus menyerahkan lampiran yang berupa sa...
...liran „Bukti Kewarganegaraan“ mereka dari Pengadilan...

Penjederhanaan Partai

DIJAKART, 11 (PNS) —

Mr. Susanto: Moh. Husni Thamrin

Teman Baik Presiden Sukarno

Ulangtahn-19 Wafatnja Thamrin

PENDUK, Jakarta, Minggu, 11

Ulangtahn-19 Wafatnja Thamrin

Peninjauan Menit

Mengenal Hoakku

Demi „Pembaharuan Djiwa“

Djuanda Lapor: Perekonomian Kita Berangsur-angsur Tambah Baik

DIJAKART, 12 (PR)

D ALAM rangka usaha „pembaharuan djiwa“ dikala...

Demi „Pembaharuan Djiwa“

Pemerintahan

DIJAKART, 12 (PR)

Pembangunan

Kolopaking (IPKI): Kini Quo Vadis

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

Suwono (PNI): Kurangi Resepsi? Dll

Adakan Retolusing Susunan Kabinet

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

Deutsche Reichspartei Dierman Barat

Merajakan Pesta Dim Suasana Nazi

Ketuanja Bekas Djendral Hitler

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

Montgomery Ke RRT

Atas Undangan Mao

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

Takuti Singapura

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

BT Bolet Terbit Lagi

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

Ohlch D Sungsung Tungku Singer (IV)

TT-III „Siliwangi“

Sekarang KODAM-VI

BANDUNG 12 (PR) —

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

Malam Kesenian Di „Bumi Sangkurian“ Bandung

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

DIJAKART, 11 (ANT-PR)

Sumber: Surat Kabar Pikiran Rakjat, 12 Januari 1960.

Lampiran 3

Surat Kabar Pikiran Rakjat

KUNYUNGAN JAMARAHAM I
Tgl. 1 Juli 1961
PENGUNYUN JAMARAHAM I
DHALAM KOTA
Pekan Kanan Nasional
Dinas 080 Part.

Pikiran Rakjat

MENGADJAK PEMBATJA BERPIKIR KRITIS

Th. K. XI No. 28 - Th. R. XI No. 28-29-30-31-32

ANDA SUDAH BELI?
Buku
Kasualan Bagi Wanita Hamil
Harganya 1000
TAMBAH
DEKAT PERAN DAN PERAN
PPAP "BANDUNG" NY
Dinas 0.8 TH. BANDUNG

Polisi Harus Jadi Alat Revolusi

Pembela & Penegak 5-Sila & Manipol

Sesuai Dikaji Dina
Jama Berawal
BANDUNG, 1-7 (PR) KAPALAI Polisi Kematikan R. Ench. Dikatakan mengemukakan, agar dalam menghadapi tugas yang kian berat, polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Sederhana & Cidmat
Polisi harus sederhana dan berdisiplin. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Perkembangan
Polisi harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Polisi Harus Jadi Alat Revolusi

Pembela & Penegak 5-Sila & Manipol

Sesuai Dikaji Dina
Jama Berawal
BANDUNG, 1-7 (PR) KAPALAI Polisi Kematikan R. Ench. Dikatakan mengemukakan, agar dalam menghadapi tugas yang kian berat, polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Sederhana & Cidmat
Polisi harus sederhana dan berdisiplin. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Perkembangan
Polisi harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Polisi Harus Jadi Alat Revolusi

Pembela & Penegak 5-Sila & Manipol

Sesuai Dikaji Dina
Jama Berawal
BANDUNG, 1-7 (PR) KAPALAI Polisi Kematikan R. Ench. Dikatakan mengemukakan, agar dalam menghadapi tugas yang kian berat, polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Sederhana & Cidmat
Polisi harus sederhana dan berdisiplin. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Perkembangan
Polisi harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Polisi Harus Jadi Alat Revolusi

Pembela & Penegak 5-Sila & Manipol

Sesuai Dikaji Dina
Jama Berawal
BANDUNG, 1-7 (PR) KAPALAI Polisi Kematikan R. Ench. Dikatakan mengemukakan, agar dalam menghadapi tugas yang kian berat, polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Sederhana & Cidmat
Polisi harus sederhana dan berdisiplin. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Perkembangan
Polisi harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Polisi Harus Jadi Alat Revolusi

Pembela & Penegak 5-Sila & Manipol

Sesuai Dikaji Dina
Jama Berawal
BANDUNG, 1-7 (PR) KAPALAI Polisi Kematikan R. Ench. Dikatakan mengemukakan, agar dalam menghadapi tugas yang kian berat, polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Sederhana & Cidmat
Polisi harus sederhana dan berdisiplin. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Perkembangan
Polisi harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Polisi harus menjadi pembela dan penegak 5-Sila & Manipol. Polisi harus menjadi alat revolusi, bukan alat penjaja kekuasaan.

Sumber: Surat Kabar Pikiran Rakjat, 1 Juli 1961.

Lampiran 4

Surat Kabar Pikiran Rakjat

Lampiran 4
Surat Kabar Pikiran Rakjat

Bandung — Selasa 1 Januari 1960

Propinsi Irian Barat, "Gala Baru" Dibentuk

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

"Panglima Mandala" Diadakan

Untuk Pimpin Lanang Gerakan2 Dalam Merbut Irian - Barat

Diadakan 2-3 (APF)

Depertan (Dewan Perintah) Nasional dengan GRS, dengan dihadiri oleh "Stat Operasi" Irian Barat di Istana Reger pada hari Minggu yang diorganisir oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Perintah Irian Barat telah mengumumkan bahwa "Panglima Mandala" akan diadakan pada 2-3 Januari 1960.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Pahlawan Produksi

DAKAR, 11 (APF) — Para pahlawan produksi film "Gala Baru" yang sedang berlangsung di Istana Reger pada hari Minggu yang diorganisir oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Perintah Irian Barat telah mengumumkan bahwa "Panglima Mandala" akan diadakan pada 2-3 Januari 1960.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Akan Pilih Ri

Dika Hari Pilih

DAKAR, 11 (APF) — Para pahlawan produksi film "Gala Baru" yang sedang berlangsung di Istana Reger pada hari Minggu yang diorganisir oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Perintah Irian Barat telah mengumumkan bahwa "Panglima Mandala" akan diadakan pada 2-3 Januari 1960.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Undian Uang

Sisa Beruntung

DAKAR, 11 (APF) — Para pahlawan produksi film "Gala Baru" yang sedang berlangsung di Istana Reger pada hari Minggu yang diorganisir oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Perintah Irian Barat telah mengumumkan bahwa "Panglima Mandala" akan diadakan pada 2-3 Januari 1960.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Undian Uang

Sisa Beruntung

DAKAR, 11 (APF) — Para pahlawan produksi film "Gala Baru" yang sedang berlangsung di Istana Reger pada hari Minggu yang diorganisir oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Perintah Irian Barat telah mengumumkan bahwa "Panglima Mandala" akan diadakan pada 2-3 Januari 1960.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Perang Atau Damai Bagi Manusia

Tergantung Pada Hubungan Antara Uni Soviet Dan AS

Kennedy Harap Perundingan Dipercepat

PAIKIRACHA-GORDA, 11-12 (APF-PA)

Presiden AS John Kennedy yang sedang beristirahat pekan ini di Palm Beach pada hari Minggu telah tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan Perang Kernal.

Lampiran 5

Surat Kabar Pikiran Rakyat

[illegible]

Sumber: Surat Kabar Pikiran Rakyat Oktober 1962

Lampiran 7
Surat Keputusan Penguasa Perang Tertinggi tentang izin penelitian dan
penerbitan surat kabar 1960

PERATURAN PEPERTI NO. 10 TAHUN 1960
TENTANG IDZIN PENELITIAN SURAT KABAR
DAN MADJALAH

Pd Presiden/Panglima Tertinggi Djuanda selaku Peperti telah mengivarkan peraturan Peperti No. 10 Tahun 1960 tanggal 12 Oktober 1960 jang melarang penerbitan-penerbitan surat kabar atau madjalah tanpa idzin terlebih dahulu dari Penguasa Keadaan Bahaja.

Barang siapa jang melarang ketentuan tersebut diatas akan mendapat hukuman dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja Rp. 50.000,-

Surat kabar atau madjalah jang diterbitkan tanpa idzin sebagai jang dimaksud diatas, sedjak mulainja berlaku peraturan ini dapat dirampas dan/ atau dimusnahkan.

PENDJELASAN

Dalam pendjelasan diatas peraturan Peperti No. 10 Tahun 1960 itu dikatakan, bahwa dalam usaha pemerintah untuk membawa serta seluruh golongan masyarakat mendukung kegiatan-kegiatan Pemerintah dan alat-alatja diperlukan alat-alat publikasi dan alat-alat penjalur pendapat umum setjara luas, antara lain surat kabar dan madjalah.

Akan tetapi disamping itu untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum perlu diadakan penelitian umum jang telah dan/ atau akan diberikan oleh Peperti, sementara peridzinan long telah diberikan tidak luput dari kemungkinan pendjabutan, apabila menurutPKB Daerah jang bersangkutan, penerbit jang memiliki peridzinan itu tidak mematuhi pedoman-pedoman jang dimaksudkan.

Isi peraturan ini sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang: bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum perlu mengadakan ketentuan mengenai izin terbit terhadap penertiban surat kabar dan madjalah;

Mengingat: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 Tahun 1959 dan No. 3 Tahun 1960; 2. Pasal 13 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48, dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139- Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang keadaan Bahaja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan tentang izin tertib terhadap penertiban surat kabar dan madjalah.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 3 dan No. 5 Tahun 1960, melarang penertiban surat kabar atau madjalah tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Penguasa Keadaan Bahaja Daerah, yang dalam hal ini pelaksanaannya dijalankan oleh Kepala Seksi Keamanan/pertahanan, Staff Penguasa Keadaan Bahaja Daerah.

Pasal 2

Barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang disebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 3

Tindakan pidana yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 4

Surat kabar atau madjalah jang diterbitkan tanpa idzin sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan ini, sedjak mulai berlakunja Peraturan ini, dapat dirampas dan/ atau dimusnahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku jang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku untuk daerah-daerah pada tanggal 1 November 1960. Agar supaja setiap orng dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 12 Oktober 1960
Pedjabat Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia
selaku

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 12 Oktober 1960
Pedjabat Sekertaris Negara

Penguasa Perang Tertinggi

ttd

Ttd

Djuanda

Santoso

Sumber, LIPI, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1980).

Lampiran 8

Surat Keputusan staff Angkatan Darat tentang Peraturan Peringatan terhadap pers tahun 1956

**PERATURAN
KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
SELAKU PENGUASA MILITER
No. PKM. 001/9/1956**

**KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
SELAKU PENGUASA MILITER
(Sumber: LIPI, Kompas 2002: 362)**

MENGINGAT

Bahwa di hari-hari belakangan ini ternyata beredarnya dichalajak umum tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan jang menurut atau mengandung ketjaman-ketjaman, persangkaan (insinivatics), bahwa penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau sesuatu madjelis umum, atau seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab mendjalankan pekerdjaan dengan sjah, kin dari itu memuat atau mengandung pula pernyataan permusuhan, kebentjiaan atau penghinaan terhadap pemerintah; atau perasaan permusuhan, kebentjiaan atau penghinaan diantaranya terhadap golongan-golongan penduduk; seterusnya tulisan-tulisan itu memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan jang menerbitkan keonaran di kalangan rakjat; bahwa tidak sekaligus adanya tanda-tanda keadaan demikian itu akan reda kembali, bahkan gejala-gejala menundjukkan akan meningkatkan keadaan itu; bahwa dengan alat-alat jang ada pada waktu ini tidak mungkin atau kurang efectief-nja mentjegah beredarnya tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan seperti tersebut di atas; bahwa dan itu dianggap perlu diadakan suatu peraturan jang mempunjai daja pentjegahan oleh penguasa militer, di mna territorium-territorium masih ada di dalam keadaan perang, satu dan lain tidak akan mengurangi kekuatan peraturan-peraturan dan undang-undang hukum jang ada; Mengingat pasal 11 jo pasal 40 dari Peraturan Keadaan Perang dan Darurat;

MEMUTUSKAN

Mengadakan Peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Melarang mentjetak, menerbitkan, menjatakan akan datangja menawarka, menjiarkan, menempelkan, memperdengarkan atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau lukisan-lukisan, jang memuat atau mengandung ketjaman-ketjaman, persangkaan-persangkaat (insinuaries atau penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau suatu madjelis umum atau seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab mendjalankan pekerjaan dengan sjah; yang memuat atau tulisan-tulisan jang memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan jang dapat menerbitkan keonaran di kale ngan rakjat.

Pasal 2

Barang siapa jang melanggar larangan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamnja satu tahun atau denda setinggi-tingginja Rp 10.000,-

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkanja

Ditetapkan di: Djakarta

Pada tanggal: 14 September 1956

Pada djam : 14.30

KEPALA STAF AMGKATAN DARAT

PENGUASA MILITER

Ttd

A.H.NASUTION

DJEND.MAJOR NRP: 13619

Sumber, LIPI, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1980).

Lampiran 9

Peraturan Pernyataan wajib persetujuan 19 pasal bagi Pers.

Sembilan Belas Pasal yang harus disetujui oleh penerbit surat kabar di tahun 1960

1. Kami sanggup mematuhi pedoman-pedoman yang telah dan/atau akan dikeluarkan/diberikan oleh Penguasa Perang Tertinggi dan lain-lain instansi Pemerintah yang berwenang mengenai penerbitan.
2. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Manifesto Politik RI secara keseluruhan.
3. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela program pemerintah.
4. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
5. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela UUD 1945.
6. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Pancasila.
7. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Sosialisme Indonesia.
8. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Demokrasi Terpimpin.
9. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Ekonomi Terpimpin.
10. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela kepribadian nasional Indonesia.
11. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela matabat Negara Republik Indonesia.
12. Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memberantas imperialism dan kolonialisme, liberalism, federalism/separatism.

13. Penerbitan kami wajib menjadi pembela/pendukung dan alat pelaksana dari politik bebas dan aktif Negara RI serta tidak menjadi pembela/pendukung dan alat dari pada Perang Dingin antara blok negara asing.
14. Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pancasila.
15. Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Manifesto Politik RI.
16. Penerbitan kami wajib membantu usaha penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum serta ketenangan politik.
17. Penerbitan kami tidak akan membuat tulisan-tulisan atau lukisan-lukisan/gambar-gambar yang bersifat sensasional dan merugikan akhlak.
18. Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung penghinaan terhadap kepada negara atau kepala pemerintahan dari negara asing yang bersahabat dengan Republik Indonesia.
19. Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung pembelaan terhadap organisasi yang dibubarkan atau dilarang berdasarkan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960.

Sumber, LIPI, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1990).



Lampiran 11

Surat Kabar Pikiran Rakjat



Sumber : Surat Kabar Pikiran Rakjat, 2 Desember 1966.

Lampiran 12

Surat Kabar Pikiran Rakjat

Republika
No. 1000
Bandung, Senin, 3 Agustus 1968

HARIAN UMUM
Pikiran Rakjat
MENGADJAK PEMBATA BERPIKIR KRITIS
Jalan K. N. No. 55 - Jalan Republik, K. N.

SIKULIR 4000 R.
SIKULIR 5000 R.
24 BARU LAJAL 138 HINDRAH - MUKID 1500

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Beladjar Masmahini (3)

Papori, Sandung Achiraja Menang.

Bergerak Madiu

Sukarno-isme

Babak Final Kejurangan PSSI

Alo Hut Penglima Adja & Silwani

Kelompokan Adjaran 2, Bung Karno

Persib - Perseba 3-1

DOMPET DWIKORA

Sukarno-isme

Persib Kiri Mampin Lagi

Utk Perkuat Ketahanan Revolusi
Pembatalan...
Presiden Sukarno Mesjerkun :
Bergerak Madiu

Kelompokan Adjaran 2, Bung Karno
Jang Haru Kita Miliki
KITA berhadapan dengan Sukarno-isme. Untuk itu kita harus belajar terlebih dulu. Belajar mengenai apa itu Sukarno-isme, apa itu Sukarno-isme, apa itu Sukarno-isme...

Babak Final Kejurangan PSSI
Persib - Perseba 3-1
Persib Kiri Mampin Lagi
BANDUNG, 28 AGUSTUS. Pertandingan babak final kejurangan PSSI 1968 antara Persib Bandung dan Perseba Bandung berlangsung di Stadion Siliwangi pada malam Minggu ini.

Presiden Sukarno Mesjerkun :
Bergerak Madiu
Alo Hut Penglima Adja & Silwani
DOMPET DWIKORA
Utk Perkuat Ketahanan Revolusi
Pembatalan...
Presiden Sukarno Mesjerkun :
Bergerak Madiu

Kelompokan Adjaran 2, Bung Karno
Jang Haru Kita Miliki
KITA berhadapan dengan Sukarno-isme. Untuk itu kita harus belajar terlebih dulu. Belajar mengenai apa itu Sukarno-isme, apa itu Sukarno-isme, apa itu Sukarno-isme...

Babak Final Kejurangan PSSI
Persib - Perseba 3-1
Persib Kiri Mampin Lagi
BANDUNG, 28 AGUSTUS. Pertandingan babak final kejurangan PSSI 1968 antara Persib Bandung dan Perseba Bandung berlangsung di Stadion Siliwangi pada malam Minggu ini.

Pengumuman Ttg Dana Sukurelawan Dwikora

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Sultan & J.D. Massie

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Harapkan Agar Kerdja dengan Giat & Tepat

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Presiden Sukarno Mesjerkun :

Umat Islam Harus Ikut Berkelomba Utk Kebaikan

Kelas Disiplin, ulangan

Sumber : Surat Kabar Pikiran Rakjat, 3 Agustus 1968.

Lampiran 13

Surat Kabar Pikiran Rakyat

[illegible]

Lampiran 14

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Publikasi
INDONESIA, Negeri, GANETO, Indonesia
1960 dan **1961** dan **1962** dan **1963** dan **1964** dan **1965** dan **1966** dan **1967** dan **1968** dan **1969** dan **1970** dan **1971** dan **1972** dan **1973** dan **1974** dan **1975** dan **1976** dan **1977** dan **1978** dan **1979** dan **1980** dan **1981** dan **1982** dan **1983** dan **1984** dan **1985** dan **1986** dan **1987** dan **1988** dan **1989** dan **1990** dan **1991** dan **1992** dan **1993** dan **1994** dan **1995** dan **1996** dan **1997** dan **1998** dan **1999** dan **2000** dan **2001** dan **2002** dan **2003** dan **2004** dan **2005** dan **2006** dan **2007** dan **2008** dan **2009** dan **2010** dan **2011** dan **2012** dan **2013** dan **2014** dan **2015** dan **2016** dan **2017** dan **2018** dan **2019** dan **2020** dan **2021** dan **2022** dan **2023** dan **2024** dan **2025** dan **2026** dan **2027** dan **2028** dan **2029** dan **2030** dan **2031** dan **2032** dan **2033** dan **2034** dan **2035** dan **2036** dan **2037** dan **2038** dan **2039** dan **2040** dan **2041** dan **2042** dan **2043** dan **2044** dan **2045** dan **2046** dan **2047** dan **2048** dan **2049** dan **2050** dan **2051** dan **2052** dan **2053** dan **2054** dan **2055** dan **2056** dan **2057** dan **2058** dan **2059** dan **2060** dan **2061** dan **2062** dan **2063** dan **2064** dan **2065** dan **2066** dan **2067** dan **2068** dan **2069** dan **2070** dan **2071** dan **2072** dan **2073** dan **2074** dan **2075** dan **2076** dan **2077** dan **2078** dan **2079** dan **2080** dan **2081** dan **2082** dan **2083** dan **2084** dan **2085** dan **2086** dan **2087** dan **2088** dan **2089** dan **2090** dan **2091** dan **2092** dan **2093** dan **2094** dan **2095** dan **2096** dan **2097** dan **2098** dan **2099** dan **2100** dan **2101** dan **2102** dan **2103** dan **2104** dan **2105** dan **2106** dan **2107** dan **2108** dan **2109** dan **2110** dan **2111** dan **2112** dan **2113** dan **2114** dan **2115** dan **2116** dan **2117** dan **2118** dan **2119** dan **2120** dan **2121** dan **2122** dan **2123** dan **2124** dan **2125** dan **2126** dan **2127** dan **2128** dan **2129** dan **2130** dan **2131** dan **2132** dan **2133** dan **2134** dan **2135** dan **2136** dan **2137** dan **2138** dan **2139** dan **2140** dan **2141** dan **2142** dan **2143** dan **2144** dan **2145** dan **2146** dan **2147** dan **2148** dan **2149** dan **2150** dan **2151** dan **2152** dan **2153** dan **2154** dan **2155** dan **2156** dan **2157** dan **2158** dan **2159** dan **2160** dan **2161** dan **2162** dan **2163** dan **2164** dan **2165** dan **2166** dan **2167** dan **2168** dan **2169** dan **2170** dan **2171** dan **2172** dan **2173** dan **2174** dan **2175** dan **2176** dan **2177** dan **2178** dan **2179** dan **2180** dan **2181** dan **2182** dan **2183** dan **2184** dan **2185** dan **2186** dan **2187** dan **2188** dan **2189** dan **2190** dan **2191** dan **2192** dan **2193** dan **2194** dan **2195** dan **2196** dan **2197** dan **2198** dan **2199** dan **2200** dan **2201** dan **2202** dan **2203** dan **2204** dan **2205** dan **2206** dan **2207** dan **2208** dan **2209** dan **2210** dan **2211** dan **2212** dan **2213** dan **2214** dan **2215** dan **2216** dan **2217** dan **2218** dan **2219** dan **2220** dan **2221** dan **2222** dan **2223** dan **2224** dan **2225** dan **2226** dan **2227** dan **2228** dan **2229** dan **2230** dan **2231** dan **2232** dan **2233** dan **2234** dan **2235** dan **2236** dan **2237** dan **2238** dan **2239** dan **2240** dan **2241** dan **2242** dan **2243** dan **2244** dan **2245** dan **2246** dan **2247** dan **2248** dan **2249** dan **2250** dan **2251** dan **2252** dan **2253** dan **2254** dan **2255** dan **2256** dan **2257** dan **2258** dan **2259** dan **2260** dan **2261** dan **2262** dan **2263** dan **2264** dan **2265** dan **2266** dan **2267** dan **2268** dan **2269** dan **2270** dan **2271** dan **2272** dan **2273** dan **2274** dan **2275** dan **2276** dan **2277** dan **2278** dan **2279** dan **2280** dan **2281** dan **2282** dan **2283** dan **2284** dan **2285** dan **2286** dan **2287** dan **2288** dan **2289** dan **2290** dan **2291** dan **2292** dan **2293** dan **2294** dan **2295** dan **2296** dan **2297** dan **2298** dan **2299** dan **2300** dan **2301** dan **2302** dan **2303** dan **2304** dan **2305** dan **2306** dan **2307** dan **2308** dan **2309** dan **2310** dan **2311** dan **2312** dan **2313** dan **2314** dan **2315** dan **2316** dan **2317** dan **2318** dan **2319** dan **2320** dan **2321** dan **2322** dan **2323** dan **2324**

Lampiran 15

Surat Kabar Pikiran Rakjat

Tuplikan (17)
KITA sudah mendengar berita tentang...
BUND KARIO 11.4.62

BANDUNG - RAU PAKING, 1 OKTOBER 1962

Perutusan Rakjat Irian-Barat

Pudji Presiden

Karangan Bunga Bagi...
ALRI Membantu Komando Baru

Flotila Peluru Kendali

Oktober Ini Disiapkan

Perlama Dibekal Bahan Selatan

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Komando Flotila Kapal Peluru Kendali...
Oktober ini disiapkan...
Perlama dibekal bahan selatan...

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Perutusan Rakjat Irian-Barat...
Pudji Presiden...

Uralan Deppen: Hari 1 Oktober Penting Dlm Sedjarah Indonesia

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Hari 1 Oktober merupakan...
Penting dalam sedjarah Indonesia...

Tanda Penerangan

Dari Belanda

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Dokter dari Belanda...
Tanda penerangan...

Hakim Dan Terakwa Main Volleyball

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Hakim dan terakwa...
Main volleyball...

Pikiran Rakyat

MENGADAP PEMILITAN BERPIKIR KRITIS
Tahun ke XII No 164 - Tahun Republik ke XVII

2 Terdakwa Perkara Pembunuhan Telah Diminta Hukuman Mati

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
2 terdakwa perkara pembunuhan...
Telah diminta hukuman mati...

Kerjasama Ekonomi

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Kerjasama ekonomi...
Dituntut...

Undian Uang 100

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Undian uang 100...
Dituntut...

Dr. Han Pamulan

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Dr. Han Pamulan...
Dituntut...

Uralan Deppen: Hari 1 Oktober Penting Dlm Sedjarah Indonesia

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Uralan Deppen...
Hari 1 Oktober penting...

Tanda Penerangan

Dari Belanda

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Dokter dari Belanda...
Tanda penerangan...

Hakim Dan Terakwa Main Volleyball

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Hakim dan terakwa...
Main volleyball...

Pikiran Rakyat

MENGADAP PEMILITAN BERPIKIR KRITIS
Tahun ke XII No 164 - Tahun Republik ke XVII

2 Terdakwa Perkara Pembunuhan Telah Diminta Hukuman Mati

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
2 terdakwa perkara pembunuhan...
Telah diminta hukuman mati...

Kerjasama Ekonomi

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Kerjasama ekonomi...
Dituntut...

Undian Uang 100

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Undian uang 100...
Dituntut...

Dr. Han Pamulan

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Dr. Han Pamulan...
Dituntut...

Uralan Deppen: Hari 1 Oktober Penting Dlm Sedjarah Indonesia

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Uralan Deppen...
Hari 1 Oktober penting...

Tanda Penerangan

Dari Belanda

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Dokter dari Belanda...
Tanda penerangan...

Hakim Dan Terakwa Main Volleyball

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Hakim dan terakwa...
Main volleyball...

Pikiran Rakyat

MENGADAP PEMILITAN BERPIKIR KRITIS
Tahun ke XII No 164 - Tahun Republik ke XVII

2 Terdakwa Perkara Pembunuhan Telah Diminta Hukuman Mati

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
2 terdakwa perkara pembunuhan...
Telah diminta hukuman mati...

Kerjasama Ekonomi

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Kerjasama ekonomi...
Dituntut...

Undian Uang 100

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Undian uang 100...
Dituntut...

Dr. Han Pamulan

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Dr. Han Pamulan...
Dituntut...

Uralan Deppen: Hari 1 Oktober Penting Dlm Sedjarah Indonesia

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Uralan Deppen...
Hari 1 Oktober penting...

Tanda Penerangan

Dari Belanda

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Dokter dari Belanda...
Tanda penerangan...

Hakim Dan Terakwa Main Volleyball

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Hakim dan terakwa...
Main volleyball...

Pikiran Rakyat

MENGADAP PEMILITAN BERPIKIR KRITIS
Tahun ke XII No 164 - Tahun Republik ke XVII

2 Terdakwa Perkara Pembunuhan Telah Diminta Hukuman Mati

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
2 terdakwa perkara pembunuhan...
Telah diminta hukuman mati...

Kerjasama Ekonomi

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Kerjasama ekonomi...
Dituntut...

Undian Uang 100

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Undian uang 100...
Dituntut...

Dr. Han Pamulan

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Dr. Han Pamulan...
Dituntut...

Uralan Deppen: Hari 1 Oktober Penting Dlm Sedjarah Indonesia

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Uralan Deppen...
Hari 1 Oktober penting...

Tanda Penerangan

Dari Belanda

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Dokter dari Belanda...
Tanda penerangan...

Hakim Dan Terakwa Main Volleyball

DIJAKARTA, 3-10 (AP) -...
Hakim dan terakwa...
Main volleyball...